

# Ekonomi Sumber Daya Manusia

Rossanto Dwi Handoyo, S.E, M.Si, Ph.D.



## PENDAHULUAN

---

Sebagian besar waktu para ekonom yang menelaah ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) lebih banyak terpusat pada keseimbangan di pasar tenaga kerja. Bagaimana proses bekerjanya pasar tenaga kerja mampu membantu menentukan tingkat kesejahteraan umat manusia. Jenis barang apa yang dapat dipenuhi untuk dikonsumsi, siapa saja yang akan mengkonsumsi, di mana kita ambil kesempatan untuk berlibur, di sekolah mana anak-anak kita akan sekolah, dan semua hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Ekonomi Sumber Daya Manusia (baca: ekonomi ketenagakerjaan) mempelajari bagaimana pasar tenaga kerja bekerja.

Ketertarikan kita pada pasar tenaga kerja meningkat tidak hanya dari adanya kepentingan kita sendiri, tetapi juga karena banyak isu-isu yang menjadi perdebatan berkaitan dengan kebijakan di bidang sosial yang bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja khususnya pada sekelompok tenaga kerja tertentu atau pertanyaan yang banyak menyangkut mengenai hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan.

Ekonomi Sumber Daya Manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi sumber daya manusia adalah penerapan teori pada analisis sumber daya manusia.

Di sisi lain, Ekonomi Sumber Daya Manusia (ketenagakerjaan) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun *agregatif* dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jerih payahnya tersebut di pasar tenaga kerja. Pada dasarnya ilmu ini membahas tentang bagaimana perilaku pengusaha perorangan maupun secara *agregatif* dalam usahanya memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya dan tetap didasarkan atas pertimbangan memperoleh laba ataupun keuntungan optimal (kerugian minimal).

Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia antara lain: dinamika kependudukan, ketenagakerjaan, struktur ketenagakerjaan, sektor informal-formal, transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerja anak, perencanaan tenaga kerja, serta penduduk, hubungan industrial, ketimpangan upah dan ketidakmerataan ekonomi. Melihat ruang lingkup tersebut berarti ekonomi sumber daya manusia (*Human Resources Economic*) berkaitan dengan studi: perencanaan sumber daya manusia (*human resources planning*), ekonomi ketenagakerjaan (*Labour Economics*) dan ekonomi kependudukan (*Population Economics*).

Di antara isu-isu kebijakan yang akan dipelajari dalam ekonomi ketenagakerjaan modern adalah:

1. Apa yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat secara signifikan pada awal abad yang lalu?
2. Apa dampak dari imigrasi terhadap upah dan kesempatan kerja bagi pekerja pribumi?
3. Apakah upah minimum mampu meningkatkan tingkat pengangguran dari pekerja tidak terlatih?
4. Apakah subsidi upah dan pajak membuat perusahaan meningkatkan tingkat kesempatan kerja?
5. Apa dampak keselamatan kerja dan aturan kesehatan bagi kesempatan kerja dan pendapatan?
6. Apakah subsidi pemerintah bagi investasi modal sumber daya manusia dari pekerja yang tidak memiliki keunggulan merupakan suatu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja perekonomian?
7. Apa dampak ekonomi dari perserikatan pekerja baik untuk anggotanya maupun bagi perekonomian secara keseluruhan?

Setelah mempelajari modul ini secara umum, Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep ekonomi kesejahteraan dalam kaitannya dengan kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya, secara khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. Keterkaitan sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan.
2. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja.
3. Konsep tenaga kerja
4. Kondisi kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
5. Konsep dan kategori pengangguran.
6. Teori pengangguran.

7. Tingkat *steady state* pengangguran.
8. Durasi pengangguran.
9. Kondisi pengangguran di Indonesia.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Pembangunan

### A. HUBUNGAN EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia, Amerika, India, Brazil, China, dan lain sebagainya akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi dunia, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa.

Adanya kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan di satu pihak dan adanya persediaan atau penawaran tenaga kerja di pihak yang lain, mengakibatkan timbulnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu.

Ekonomi pembangunan sendiri mempunyai sejarah yang unik untuk disimak, pada awalnya makna pembangunan lebih menitikberatkan kepada aspek ekonomi, yaitu kemiskinan. Seiring berjalannya waktu makna tersebut meluas menjadi peningkatan kualitas kehidupan (seringkali pengukuran kualitas ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)). Setidaknya terdapat tiga nilai inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami nilai pembangunan (Todaro, Hal 25:2012), yaitu kecukupan, jati diri, dan kebebasan.

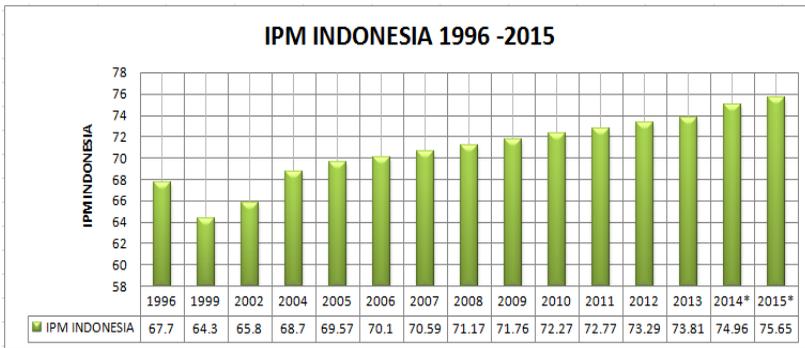
Kecukupan di sini tidak hanya merujuk pada makanan saja namun lebih luas daripada itu. Kecukupan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana tercukupinya semua kebutuhan dasar untuk setiap individu. Apabila kebutuhan dasar ini tidak dapat tercukupi salah satunya maka muncullah kondisi 'keterbelakangan absolut'. Kecukupan tersebut dipenuhi oleh fungsi dasar perekonomian, yaitu penyediaan perangkat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Atas dasar itu, dapat dinyatakan

bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

Sebagai bagian dari sebuah gugusan masyarakat yang universal, sebuah negara atau bangsa memerlukan sikap untuk menghargai diri sendiri, mampu dan perlu untuk mengejar suatu tujuan serta bentuk pernyataan diri yang lain. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah istilah, yaitu 'jati diri'. Pencarian jati diri bagi sebuah negara yang sedang berkembang sangat diperlukan karena proses masuknya informasi dari negara-negara maju akan membuat sebuah negara sedang berkembang kehilangan makna keberadaannya. Bagi sebuah negara kehilangan jati diri merupakan masalah yang sangat besar. Tujuan pembangunan serta arah yang telah ditetapkan akan berubah apabila sebuah negara kehilangan jati diri. Ekses negatif dari kehilangan itu adalah semakin tingginya sifat dan sikap konsumerisme pada setiap individu dari sebuah negara.

Kehilangan makna atau jati diri juga akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dengan kata lain kebebasan sebuah negara menjadi hilang. Kebebasan yang dapat diartikan sebagai kemerdekaan individu (negara) dari semua jenis perbudakan maupun penghambaan kepada individu (negara) lain. Kebebasan untuk memilih model atau tujuan pembangunan yang sesuai bagi negaranya.

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) atau yang sering kita sebut IPM adalah indikator pengukuran pencapaian sosioekonomi suatu negara dengan mengkombinasikan pencapaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2012: 25). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu: *a long and healthy life* (umur panjang dan hidup sehat), *knowledge* (pengetahuan), dan *a decent standard of living* (standar hidup layak) (BPS, 2015). IPM memeringkatkan negara atau daerah dengan skala 0 (pembangunan manusia rendah) sampai 1 (pembangunan manusia tinggi) berdasarkan pada tiga tujuan pembangunan, yaitu masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan harapan hidup setelah lahir, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat *melek* huruf orang dewasa dan rasio partisipasi sekolah bruto, serta standar hidup yang diukur dengan Produk Domestik Bruto per kapita (PDRB per kapita) yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat di setiap negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

**Gambar 1.1**  
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 1996 - 2015

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia selama 1996 – 2015 memiliki tren peningkatan positif yang signifikan, di mana hasil estimasi IPM Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan 0.69% setiap tahunnya. Dua digit angka IPM Indonesia dikarenakan standar penulisan IPM di Indonesia adalah 2 digit sehingga untuk menginterpretasikan nilai IPM perlu disesuaikan dengan membagi 100 pada angka IPM, misalnya saja IPM tahun 2015 yang sebesar 75.65 disesuaikan menjadi 0.7565 (Gambar 1.1).

Secara umum kondisi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Indonesia cukup baik atau bisa dikatakan pembangunan manusia Indonesia tinggi hal ini dikarenakan angka IPM yang terus meningkat dan nilainya mendekati 1. Namun demikian, ketimpangan IPM di berbagai daerah di Indonesia juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selama kurun waktu 19 tahun, DKI Jakarta selalu berada di posisi IPM paling tinggi (0.7859), sedangkan Papua selalu berada di posisi IPM paling rendah (0.6625) sehingga meskipun secara keseluruhan IPM Indonesia baik, namun jika dilihat secara parsial akan terlihat ketimpangan antara daerah yang dekat dan jauh dengan Pemerintahan Pusat (lihat Gambar 1.2). Selain itu juga, kita dapat melihat bahwa IPM Indonesia turun di tahun 1999, hal ini diindikasikan karena pengaruh setelah terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia di tahun 1998.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Gambar 1.2  
IPM Masing-Masing Provinsi Indonesia Tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki keterkaitan erat dengan Ekonomi Sumber Daya Manusia. IPM yang tinggi menunjukkan pembangunan ekonomi sumber daya manusia yang semakin baik. IPM Indonesia yang semakin meningkat menggambarkan bagaimana tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sumber daya manusia (tenaga kerja) di Indonesia yang merupakan indikator pembangunan ekonomi sumber daya manusia semakin meningkat pula. IPM itu sendiri disesuaikan dengan daya beli masyarakat setiap negara sehingga kondisi tenaga kerja di setiap negara pun berbeda.

Kasus permintaan tenaga kerja di negara maju berbeda dengan negara sedang berkembang. Di negara maju, harga pasar untuk tenaga kerja berkisar di atas kebutuhan fisik minimum negara tersebut, namun di negara sedang berkembang apabila harga (upah) disesuaikan dengan kondisi pasar maka pekerja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan fisik minimumnya. Kebutuhan fisik minimum (KFM) adalah kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin, dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan syarat-syarat kesehatan. Kondisi itu mencerminkan terjadinya 'keterbelakangan absolut'. Keterbelakangan absolut adalah kondisi kemiskinan masyarakat yang diiringi dengan kondisi kualitas hidup yang parah dari sisi pendidikan, kesehatan dan kondisi

lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, di Indonesia muncul kebijakan upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi. Kebijakan tersebut sebagai pernyataan sikap dari Pemerintah Indonesia bahwa pemenuhan kebutuhan fisik minimum pekerja merupakan syarat utama kompensasi upah. Apabila mempertimbangkan semua aspek investasi khususnya investasi dari luar negeri persyaratan tersebut merupakan penghalang mengingat produktivitas pekerja Indonesia yang masih rendah. Kebijakan itu timbul sebagai akibat kemampuan untuk memahami jati diri yang kemudian diturunkan dalam kebebasan pembentukan tujuan pembangunan.

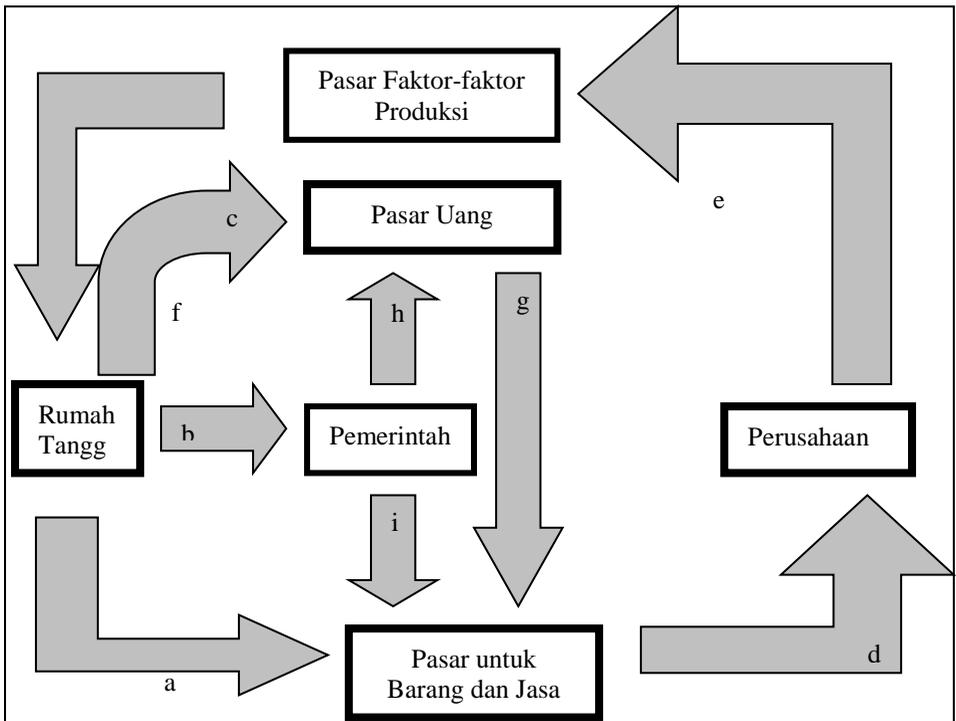
## **B. EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDUDUK**

Pasar tenaga kerja adalah bagian dari pasar faktor produksi. Setiap unsur pembentuk dalam pasar faktor-faktor produksi tersebut sebagian besar berasal dari rumah tangga (tanah, keahlian (*skill*), kemampuan manajerial serta modal). Perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Dalam perekonomian terjadi interaksi antarindividu (manusia) yang berupa aktivitas ekonomi, antara lain konsumsi, investasi, penawaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk berproduksi (produksi tidak hanya merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang akhir saja, lebih dari itu produksi merupakan proses pembentukan nilai tambah bagi setiap individu).

Salah satu ukuran penilaian kemampuan produksi menggunakan produktivitas. Secara sederhana, makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai berikut: kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Melalui sudut pandang makroekonomi, produktivitas diukur menggunakan pendekatan kependudukan. Pengukuran ini melibatkan banyak unsur dalam penduduk (antara lain: agama, budaya, unsur geografis, politik, keamanan). Oleh karena itu, seringkali pengukuran produktivitas secara makro menggunakan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita dari penduduk sebuah negara dapat dikatakan bahwa produktivitas penduduk negara tersebut meningkat.

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi dan penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari

pasar kerja. Apabila tenaga kerja bekerja maka ia akan memperoleh upah atau gaji yang merupakan imbalan atas jasanya. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilempar ke pasar barang dan jasa. Di pasar barang dan jasa, timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar harga barang atau jasa tersebut. Pembayaran (dalam bentuk uang) oleh penduduk pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusinya di dalam proses produksi sehingga terjadilah arus putar balik dari aliran barang dan jasa serta aliran uang di masyarakat. Pada dasarnya, aliran siklus tersebut akan menyebabkan terjadinya keseimbangan di dalam perekonomian. Namun demikian, suatu saat keseimbangan itu bisa terganggu, yaitu apabila terjadi kejutan (gangguan/*shock*) dari luar (faktor eksogen) sehingga keseimbangan dalam siklus perekonomian berubah.



Sumber: Mankiw, 2007

Gambar 1.3  
Siklus dalam Perekonomian

- Keterangan gambar:
- a) konsumsi rumah tangga
  - b) pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga
  - c) tabungan rumah tangga
  - d) pendapatan yang diperoleh perusahaan
  - e) pembayaran faktor produksi
  - f) pendapatan yang diperoleh rumah tangga
  - g) investasi
  - h) tabungan masyarakat (*public saving*)
  - i) belanja pemerintah

Gambar 1.3 mencoba menjelaskan aliran uang dalam perekonomian. Meskipun urutan keterangan gambar menunjukkan sebuah pola yang urut, namun hal itu tidak berarti bahwa perekonomian berawal dari konsumsi (a) dan diakhiri oleh belanja pemerintah (i). Dalam sebuah perekonomian terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu: rumah tangga (*households*), swasta (*private*), dan pemerintah (*government*). Pelaku ekonomi tersebut mempunyai cara yang spesifik dalam memenuhi kebutuhannya (*need*). Rumah tangga membutuhkan konsumsi akan barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pasar untuk barang dan jasa, di mana penawaran atas produk barang dan jasa tersebut disediakan oleh swasta (perusahaan). Perusahaan sendiri membutuhkan faktor-faktor produksi dalam menjalankan usahanya dan penawaran faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga. Sementara itu, pemerintah sebagai fasilitator membutuhkan pendapatan untuk memfasilitasi setiap aktivitas ekonomi maupun nonekonomi. Pendapatan itu diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga, meskipun perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang paling “terlihat” aktivitas ekonominya perlu disadari pula bahwa sebenarnya individu di dalam perusahaan merupakan komponen dari rumah tangga. Pajak kemudian disalurkan kepada pasar uang dan pasar untuk barang dan jasa.

### C. KONSEP TENAGA KERJA

Konsep tenaga kerja di tiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Walaupun sedang tidak

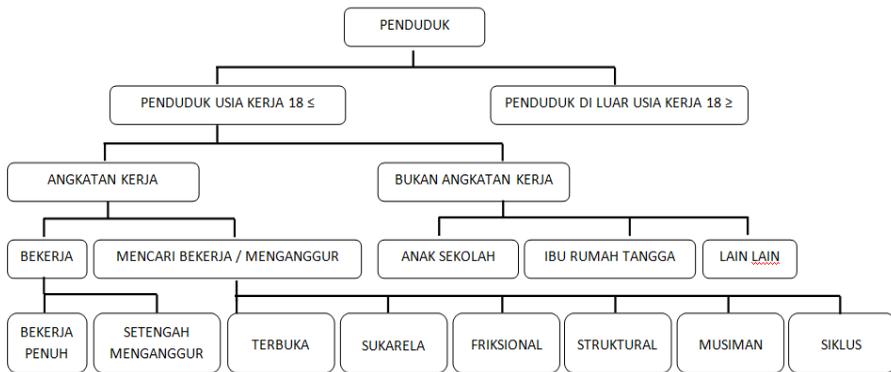
bekerja, tetapi dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi ini berbeda dengan perspektif definisi praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur.

Setiap negara memberikan batas umur yang berbeda. India misalnya, menggunakan batasan umur dari 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Selain dari umur itu (di bawah 14 tahun dan di atas usia 60 tahun), tidak digolongkan tenaga kerja. Amerika Serikat, mula-mula menggunakan batas umur minimal 14 tahun tanpa batas umur maksimum. Kemudian, sejak tahun 1967, batas umur dinaikkan menjadi 16 tahun. Di Indonesia sendiri, semula dipilih batas umur minimal 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian, tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur didasari oleh kenyataan bahwa dalam umur tersebut, sudah banyak penduduk terutama di desa-desa yang sudah bekerja di ladang atau sedang mencari pekerjaan.

Seiring dengan meningkatnya dunia pendidikan maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi berkurang. Sekarang wajib sekolah 9 tahun telah diberlakukan maka anak-anak sampai dengan usia 14 tahun akan berada di sekolah sehingga lebih tepat batas umur dinaikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya undang-undang ini, mulai tanggal 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih, namun hal ini tidak berlaku sekarang. Batas usia tenaga kerja terakhir yang diterapkan di Indonesia adalah 18 tahun, hal ini mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003, hal itu disarikan dari larangan mempekerjakan pekerja anak (setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun) namun ada pengecualian dalam peraturan tersebut, yaitu bagi anak yang berusia 13-15 tahun untuk diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu masa perkembangan serta untuk pengembangan bakat dan minat anak tersebut.

Indonesia tidak menganut batas usia maksimum. Alasannya adalah Indonesia belum mempunyai sistem jaminan nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Namun demikian, pendapatan yang diterima pun masih jauh dari cukup. Oleh sebab itu, bagi mereka yang menginjak masa pensiun tetap harus bekerja sehingga mereka digolongkan sebagai tenaga kerja, hal ini juga didukung dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang secara pasti tidak mengatur dan memuat usia pensiun bagi tenaga kerja.



Sumber: BPS, 2015

Gambar 1.4  
Diagram Pembagian Konsep Tenaga Kerja

Tenaga kerja itu sendiri, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force*, terdiri dari (1) golongan yang bekerja dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering disebut juga angkatan kerja yang potensial (*potential labor force*).

**D. KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA 2010 -2015**

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi, kesejahteraan sering dikaitkan dengan suksesnya pembangunan di suatu negara sehingga untuk mengukur sejahtera atau tidaknya suatu negara maka dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan pembangunan.

Berikut data empiris terkait kondisi kesejahteraan di Indonesia yang dicerminkan dari data indikator makro ekonomi Indonesia dalam 6 tahun terakhir (tahun 2010-2015). Data di bawah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan ekonomi, yaitu :

1. Pendekatan pertumbuhan yang dilihat dari aspek Produk Domestik Bruto (PDB), PDB per kapita, dan Laju Pertumbuhan PDB Riil.
2. Pendekatan perdagangan internasional yang dilihat dari neraca perdagangan.
3. Pendekatan pembangunan yang meliputi tingkat inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

Tabel 1.1  
Indikator Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>PDB Riil (TrilyunRupiah)</b>	6.864	7.287	7.727	8.156	8.566	8.976
<b>PDB Riil Perkapita (Juta Rupiah)</b>	27,0	30,8	33,3	36,5	41,8	45,2
<b>Laju Pertumbuhan PDB Riil (% YOY)</b>	5,61	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79
<b>Neraca Perdagangan (Juta US\$)</b>	20.067	26.061,1	-1.669,2	-4.076,9	-1.886,3	7.587,5
<b>Inflasi (%)</b>	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,4
<b>Pengangguran (%)</b>	7,28	6,68	6,23	6,03	5,82	6,18
<b>Kemiskinan (%)</b>	13,33	12,43	11,81	11,47	10,96	11,13

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) dan Kementerian Perdagangan RI (2015)

Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan peningkatan pendapatan suatu negara menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan pendapatan pada suatu negara yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh *output* ekonomi yang ada di negara tersebut, tidak mempedulikan apakah berasal dari warga negara tersebut atau tidak maka dimasukkan dalam penghitungan nilai PDB. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PDB Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Setiap tahun PDB riil Indonesia meningkat rata-rata sebesar 400-an triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada PDB per kapita Indonesia yang juga mengalami peningkatan dengan variasi kenaikan yang beragam.

Laju PDB riil menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Laju PDB riil tahun sekarang dihitung dengan membandingkan dengan nilai PDB riil tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa lajunya PDB riil cukup fluktuatif berada dikisaran 4 sampai 7% per tahun. Laju PDB riil tahun 2015 menunjukkan angka yang rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,79. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami kontraksi. Kontraksi ini banyak didorong dari kondisi perekonomian dunia yang sedang lesu sehingga laju pertumbuhan ekspor luar negeri juga mengalami pelambatan. Ditambah lagi, pertumbuhan investasi juga belum mengalami pertumbuhan yang berarti untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 bertambah 510 ribu orang menjadi 122,38 juta, dibandingkan Agustus 2014 yang sebanyak 121,87 juta jiwa (BPS, 2015). Kondisi ini menunjukkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan daya serap tenaga kerja yang menurun sehingga pengangguran meningkat. Sebagian industri yang melakukan PHK adalah industri yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut menambah beban biaya produksi sektor industri tersebut. Pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional ditambah terseoknya nilai rupiah terhadap dolar memicu terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah karyawan yang dirumahkan 26.506 orang sepanjang tahun 2015. Namun demikian, untuk mengantisipasi perekonomian yang semakin memburuk, pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang diharapkan bisa menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah memberi banyak

insentif bagi penanaman modal, salah satunya kemudahan berinvestasi di kawasan industri.

Perdagangan internasional menjadi aspek penting yang memberikan sinyal bagaimana kondisi perekonomian suatu negara yang dikaitkan dengan perekonomian negara lain. Sebagai negara yang kecil dan terbuka (*small open economy*), perekonomian dunia akan berdampak pada perekonomian domestik. Informasi mengenai neraca transaksi perdagangan menunjukkan mengenai informasi transaksi pembelian barang dari luar negeri (impor) dan transaksi penjualan barang ke luar negeri (ekspor). Kondisi nilai ekspor dan impor dapat kita lihat pada neraca perdagangan. Kondisi neraca perdagangan Indonesia cukup ekstrim di tahun 2012 di mana nilai dari neraca perdagangannya yang awalnya (tahun 2011) *surplus* 26.061 juta US\$ namun satu tahun kemudian neraca perdagangan mengalami defisit 1.669,2 juta US\$. Neraca perdagangan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di tahun tersebut terjadi penurunan ekspor yang besar dari tahun sebelumnya, yaitu dari total 203.496,6 menjadi 190.020,3 juta US\$ dan juga terjadi peningkatan impor yang besar, yaitu 177.435,6 menjadi 191.689,5 juta US\$. Penurunan ekspor terjadi pada sektor nonmigas dan gas dan peningkatan impor yang besar tersebut terjadi di sektor migas.

Pembangunan ekonomi Indonesia tercermin dari seberapa sukses pemerintah menjaga kestabilan harga, penurunan pengangguran, dan kemiskinan. Inflasi memiliki tren positif dari tahun 2010-2014, yaitu mengalami peningkatan 0.739% pada setiap tahun. Ini memberi sinyal yang kurang baik karena inflasi yang semakin tinggi akan mengurangi tingkat kesejahteraan. Namun demikian, inflasi tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi berhasil mengendalikan inflasi baik dari pengendalian permintaan maupun meningkatkan ketersediaan stok bahan pangan yang cukup. Berdasarkan hukum Philip yang menyatakan bahwa tingkat inflasi berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran maka hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia turun 0.357% setiap tahunnya. Secara rasional ketika pengangguran berkurang maka orang bekerja akan meningkat sehingga kemiskinan seseorang karena pendapatan yang rendah juga berkurang. Data empiris menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia berkurang 0.569% setiap tahunnya.

Kesejahteraan umum di Indonesia dapat dikatakan sejahtera karena dari tiga pendekatan yang dilakukan menunjukkan bahwa dua dari tiga

pendekatan menggambarkan kondisi yang baik. Dua kondisi tersebut adalah tingkat pertumbuhan yang meningkat setiap tahun dan tingkat pembangunan yang berhasil karena pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang. Keberhasilan kesejahteraan secara umum di Indonesia disinyalir memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan pada tenaga kerja di Indonesia.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sama halnya kesejahteraan umum, untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja maka kita dapat menggunakan indikator, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja adalah balas jasa terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk proses produksi, balas jasa tenaga kerja sering disebut sebagai upah. Alasan mengapa upah menjadi salah satu indikator kesejahteraan tenaga kerja adalah karena dalam setiap tuntutan tenaga kerja selalu menyinggung peningkatan upah. Kategori sejahtera dapat dilihat dari peningkatan upah di tiap tahunnya yang disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak seorang tenaga kerja.

Tabel 1.2  
Upah Minimum Regional/Provinsi di Indonesia 2010-2014

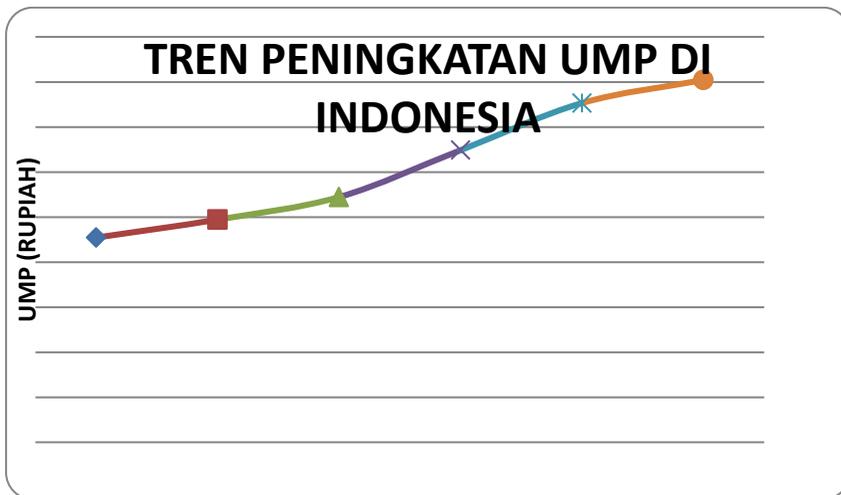
Provinsi	Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
ACEH	1,300,000	1,350,000	1,400,000	1,550,000	1,750,000	1,660,000
BALI	829,316	890,000	967,500	1,181,000	1,542,600	1,597,310
BANTEN	955,300	1,000,000	1,042,000	1,170,000	1,325,000	1,371,280
BENGKULU	780,000	815,000	930,000	1,200,000	1,350,000	1,472,500
DI YOGYAKARTA	745,694	808,000	892,660	947,114	988,500	1,063,808
DKI JAKARTA	1,118,009	1,290,000	1,529,150	2,200,000	2,441,301	3,100,000
GORONTALO	710,000	762,500	837,500	1,175,000	1,325,000	1,454,750
JAMBI	900,000	1,028,000	1,142,500	1,300,000	1,502,300	1,617,540
JAWA BARAT	671,500	732,000	780,000	850,000	1,000,000	1,039,200
JAWA TENGAH	660,000	675,000	765,000	830,000	910,000	964,500

Provinsi	Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
JAWA TIMUR	630,000	705,000	745,000	866,250	1,000,000	1,059,620
KALIMANTAN BARAT	741,000	802,500	900,000	1,060,000	1,380,000	1,437,350
KALIMANTAN SELATAN	1,024,500	1,126,000	1,225,000	1,337,500	1,620,000	1,687,350
KALIMANTAN TENGAH	986,590	1,134,580	1,327,459	1,553,127	1,723,970	1,913,130
KALIMANTAN TIMUR	1,002,000	1,084,000	1,177,000	1,752,073	1,886,315	2,111,280
KEP. BANGKA BELITUNG	910,000	1,024,000	1,110,000	1,265,000	1,640,000	1,700,100
KEP. RIAU	925,000	975,000	1,015,000	1,365,087	1,665,000	1,749,990
LAMPUNG	767,500	855,000	975,000	1,150,000	1,399,037	1,496,680
MALUKU	840,000	900,000	975,000	1,275,000	1,415,000	1,538,500
MALUKU UTARA	847,000	889,350	960,498	1,200,622	1,440,746	1,517,230
NUSA TENGGARA BARAT	890,775	950,000	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,266,690
NUSA TENGGARA TIMUR	800,000	850,000	925,000	1,010,000	1,150,000	1,205,000
PAPUA	1,316,500	1,403,000	1,585,000	1,710,000	1,900,000	1,884,400
PAPUA BARAT	1,210,000	1,410,000	1,450,000	1,720,000	1,870,000	1,978,000
RIAU	1,016,000	1,120,000	1,238,000	1,400,000	1,700,000	1,789,200
SULAWESI BARAT	944,200	1,006,000	1,127,000	1,165,000	1,400,000	1,449,620
SULAWESI SELATAN	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,440,000	1,800,000	1,890,000
SULAWESI TENGAH	777,500	827,500	885,000	995,000	1,250,000	1,280,750
SULAWESI TENGGARA	860,000	930,000	1,032,300	1,125,207	1,400,000	1,452,050
SULAWESI UTARA	1,000,000	1,050,000	1,250,000	1,550,000	1,900,000	2,040,000
SUMATERA BARAT	940,000	1,055,000	1,150,000	1,350,000	1,490,000	1,615,500
SUMATERA SELATAN	927,825	1,048,440	1,195,220	1,630,000	1,825,000	2,038,060
SUMATERA UTARA	965,000	1,035,500	1,200,000	1,375,000	1,505,850	1,642,630
INDONESIA	908,824	988,829	1,088,903	1,296,908	1,506,231	1,608,750

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

\* = Angka Estimasi

Kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan, terlihat dari UMP yang setiap tahunnya mengalami peningkatan (Gambar 1.4), namun UMP tidak mencerminkan kondisi riil di kehidupan karena dalam kenyataannya tidak sedikit Upah Minimum Kabupatennya (UMK) lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsinya, misalnya saja provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2015 memiliki UMP sebesar 1.059.620 pada kenyataannya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik memiliki UMK berkisar dari 2.700.000-an sehingga ada kemungkinan dari perspektif upah tenaga kerja sudah sejahtera.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Gambar 1.5  
Tren Peningkatan UMP Tenaga Kerja di Indonesia 2010-2015

Selain itu juga, coba kita amati program-program penunjang kinerja dan produktivitas tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekarang pemerintah mencoba untuk menyejahterakan tenaga kerja dengan mewajibkan pengusaha untuk melindungi keselamatan dan menjamin kesehatan tenaga kerja dengan asuransi sehingga muncullah Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek yang sekarang berganti nama menjadi Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dalam kaitannya dengan aspek pendidikan terhadap tenaga kerja atau pengembangan sumber daya manusia, tidak sedikit perusahaan yang menerapkan program pengembangan kapasitas melalui pengembangan keterampilan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, selain itu juga mengikuti sertifikasi tenaga kerja, yang keseluruhan itu mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga kesejahteraan tenaga kerja meningkat.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Ekonomi Sumber Daya Manusia berkaitan erat dengan ekonomi pembangunan, dalam menentukan pembangunan ekonomi sering digunakan Indeks Pembangunan Manusia. Jelaskan hakikat Indeks Pembangunan Manusia dan apa saja bidang yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia?
- 2) Setiap negara memiliki batasan tersendiri mengenai konsep tenaga kerja. Jelaskan konsep tenaga kerja yang berkaitan dengan batas umur di Indonesia sekarang!
- 3) Kesejahteraan (*welfare*) merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi, termasuk juga pada aspek ekonomi sumber daya manusia. Jelaskan konsep kesejahteraan pekerja!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) atau yang sering kita sebut IPM adalah indikator pengukuran pencapaian sosioekonomi suatu negara dengan mengkombinasikan pencapaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro, 2012: 25). IPM memeringkatkan negara atau daerah dengan skala 0 (pembangunan manusia rendah) sampai 1 (pembangunan manusia tinggi) berdasarkan pada tiga tujuan pembangunan, yaitu masa hidup (*longetivity*) yang diukur dengan harapan hidup setelah lahir, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur

dengan bobot rata-rata tingkat *melek* huruf orang dewasa, dan rasio partisipasi sekolah bruto, serta standar hidup yang diukur dengan Produk Domestik Bruto per kapita (PDRB per kapita) yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat di setiap negara.

- 2) Di Indonesia sendiri, semula dipilih batas umur minimal 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian, tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur didasari oleh kenyataan bahwa dalam umur tersebut, sudah banyak penduduk terutama di desa-desa yang sudah bekerja di ladang atau sedang mencari pekerjaan. Seiring dengan meningkatnya dunia pendidikan maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi berkurang. Sekarang wajib sekolah 9 tahun telah diberlakukan maka anak-anak sampai dengan usia 14 tahun akan berada di sekolah sehingga lebih tepat batas umur dinaikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya undang-undang ini, mulai tanggal 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih, namun hal ini tidak berlaku sekarang. Batas usia tenaga kerja terakhir yang diterapkan di Indonesia adalah 18 tahun, hal ini mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003, hal itu disarikan dari larangan mempekerjakan pekerja anak (setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun) namun ada pengecualian dalam peraturan tersebut, yaitu bagi anak yang berusia 13-15 tahun untuk diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu masa perkembangan serta untuk pengembangan bakat dan minat anak tersebut.
- 3) Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sama halnya kesejahteraan umum, untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja maka kita dapat menggunakan indikator, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja adalah balas jasa terhadap tenaga yang sudah dikeluarkan untuk proses produksi, balas jasa tenaga kerja sering

disebut sebagai upah. Alasan mengapa upah menjadi salah satu indikator kesejahteraan tenaga kerja adalah karena dalam setiap tuntutan tenaga kerja selalu menyinggung peningkatan upah. Kategori sejahtera dapat dilihat dari peningkatan upah di tiap tahunnya yang disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup layak seorang tenaga kerja.



## RANGKUMAN

---

1. Ekonomi Sumber Daya Manusia (baca: ekonomi ketenagakerjaan) mempelajari bagaimana pasar tenaga kerja bekerja. Dalam pasar kerja ada tiga pelaku penting dalam pasar, yaitu pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Pekerja memainkan peran utama dalam pasar kerja. Pekerja lah yang memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, berapa lama pekerja akan bekerja, keterampilan apa yang dibutuhkan, kapan akan berhenti bekerja, apakah perlu memasuki atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada atau tidak, dan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mengalokasikan waktu untuk bekerja atau untuk hal-hal yang lain. Semua Keputusan ini didorong oleh keinginan untuk mengoptimalkannya, yaitu memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia.
2. Tiga nilai inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami tujuan pembangunan adalah kecukupan, jati diri, dan kebebasan. Tujuan pembangunan Indonesia saat ini ditujukan kepada pembangunan kualitas manusia.
3. Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi dan penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar kerja.
4. Tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara praktis tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur, yaitu batas minimum adalah 18 tahun dan tidak ada batas usia maksimum.
5. Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang

secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.



### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang termasuk dalam tiga nilai inti pembangunan adalah ....
  - A. kecukupan
  - B. kemerdekaan
  - C. kedaulatan
  - D. kemakmuran
  
- 2) Melalui sudut pandang makro ekonomi, produktivitas diukur menggunakan pendekatan ....
  - A. pendapatan
  - B. produksi
  - C. pengeluaran
  - D. kependudukan
  
- 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah menetapkan batas usia kerja bagi angkatan kerja, yaitu ....
  - A. usia minimum 10 tahun sampai dengan 60 tahun
  - B. usia minimum 15 tahun sampai dengan 55 tahun
  - C. usia minimum 14 tahun, tanpa batas maksimum
  - D. usia minimum 18 tahun, tanpa batas maksimum
  
- 4) Kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan, sering disebut juga ....
  - A. angkatan kerja potensial
  - B. angkatan kerja menganggur dan sedang mencari kerja
  - C. angkatan kerja friksional
  - D. angkatan kerja struktural
  
- 5) Yang termasuk dalam tiga pendekatan ekonomi untuk menentukan kesejahteraan adalah
  - A. pendapatan
  - B. perdagangan
  - C. permodalan
  - D. pertumbuhan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Pengangguran

## A. KONSEP PENGANGGURAN

Menurut definisi yang diperoleh dari Sensus Penduduk tahun 1971, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (namun sensus penduduk tahun 1971 tidak memberikan batasan mengenai jumlah jam kerja per hari atau per minggu). Definisi pengangguran ini sama dengan definisi pada sensus penduduk pada tahun 2001. Secara fundamental, fenomena pengangguran di Indonesia pada saat sebelum krisis berbeda dengan negara berkembang lainnya. Di Indonesia, pengangguran yang terjadi pada saat itu adalah angkatan kerja yang mencari pekerjaan (*search unemployment*), sedangkan di negara lainnya pengangguran yang terjadi cenderung disebabkan oleh perekonomian (*structural unemployment*).

*International Labor Organization* atau ILO dalam mendefinisikan pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (Husmanns, dkk, 1992: Hal 36).

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu pengangguran friksional, musiman, struktural, dan siklikal.

**1. Pengangguran Friksional**

Pasar tenaga kerja yang mencerminkan permintaan dan penawaran tenaga kerja sesungguhnya bersifat tetap di mana ada pekerja yang diberhentikan ada juga yang bekerja. Perusahaan pun demikian, ada perusahaan yang mengurangi kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja ada juga yang mengurangi kapasitas produksinya dan mengurangi tenaga kerja. Idealnya ketika pekerja mencari pekerjaan dan perusahaan mencari pekerja bertemu maka tidak akan tercipta pengangguran.

Pengangguran friksional muncul karena pekerja dan perusahaan tidak bertemu pada satu waktu yang tepat (Borjas, 2013: Hal 506).

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, bisa terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Di satu pihak pencari kerja tidak hanya sekedar mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan tertinggi, tetapi juga kondisi kerja terbaik. Proses pemilihan seperti itu memerlukan waktu. Di lain pihak, pengusaha tidak begitu saja mengisi lowongan kerja yang ada dengan orang yang pertama kali datang melamar. Untuk mengisi satu lowongan tertentu, pengusaha cenderung untuk memilih seseorang yang dianggap terbaik di antara calon-calon yang ada. Pengisian lowongan seperti memerlukan waktu untuk proses seleksi. Selama proses yang demikian, seorang pelamar yang menunggu panggilan untuk seleksi atau ujian masuk (yang belum pasti diterima) adalah tergolong penganggur friksional.

Pengangguran jenis ini juga bisa terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja di mana lowongan pekerjaan justru bukan terdapat di sekitar tempat tinggal pencari kerja. Misalnya, pencari kerja tinggal di Surabaya, sementara lowongan pekerjaan berada di luar Surabaya. Bentuk yang terakhir adalah pencari kerja tidak mengetahui di mana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

Kebijakan untuk mengurangi pengangguran friksional dilakukan dengan menyediakan informasi lowongan pekerjaan untuk pekerja yang menganggur dan informasi pekerja untuk perusahaan yang ingin mencari pekerja.

## **2. Pengangguran Musiman**

Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim. Di luar musim panen, para petani banyak yang tidak turun ke sawah. Pada masa ini, banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekedar menunggu musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut, mereka digolongkan sebagai penganggur musiman. Namun, dalam sensus penduduk yakni Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hal ini tidak terlihat jelas karena mereka menurut definisi digolongkan bekerja.

Perubahan musim bisa juga disebabkan oleh perubahan model pada suatu industri, munculnya model baru membuat pekerja akan berhenti

sejenak karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan model baru tersebut. Sebenarnya pengangguran musiman ini tidak menimbulkan masalah berarti karena setelah musim tersebut kembali pada musim awal maka pekerja yang menganggur tersebut akan kembali ke perusahaan awal (Borjas, 2013: Hal 507).

### **3. Pengangguran Struktural**

Pengangguran Struktural terjadi karena adanya perubahan struktural dalam struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran struktural yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan dengan keterampilan tersebut. Misalnya, terjadi pergeseran dari perekonomian yang agraris menuju perekonomian yang industrial. Di satu pihak, terjadi pengurangan tenaga di sektor pertanian dan di pihak lain bertambahnya tenaga kerja di sektor industri. Akan tetapi, tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian tadi tidak begitu saja dapat terserap di sektor industri karena sektor industri memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan tertentu. Akibatnya, tenaga yang berlebih dari sektor pertanian tadi merupakan penganggur struktural.

Bentuk pengangguran struktural yang lain adalah terjadinya pengurangan pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju. Penggunaan traktor misalnya, dapat menimbulkan pengangguran di kalangan petani. Penganggur sebagai akibat struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru. Lamanya pengangguran struktural pada umumnya lebih panjang dari lamanya pengangguran friksional.

Pengangguran struktural akan tetap tumbuh meskipun pekerja dan perusahaan sudah mengetahui informasi, hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak sesuai dengan pekerja ataupun perusahaan (Borjas, 2013: Hal 507). Kebijakan untuk mengurangi pengangguran ini adalah menyediakan pelatihan keterampilan baru untuk pekerja sehingga keterampilan pekerja sesuai dengan kebutuhan struktur ekonomi baru.

### **4. Pengangguran Siklikal**

Pengangguran siklikal atau konjungtural terjadi karena adanya siklus ekonomi yang melamban. Meskipun pekerja dan perusahaan bertemu dan keterampilan pekerja sesuai dengan kebutuhan, pengangguran masih dapat

tercipta karena ekonomi di suatu negara tersebut mengalami pemerosotan ekonomi (resesi). Kondisi ekonomi yang merosot menyebabkan tingkat konsumsi menurun sehingga perusahaan hanya membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit sehingga terjadi pemberhentian banyak pekerja dan terciptalah pengangguran siklikal. Ada kelebihan stok tenaga kerja baru yang dibutuhkan, namun permintaannya hanya sedikit.

Kebijakan dalam menyelesaikan pengangguran ini adalah dengan mendorong permintaan agregat sehingga perekonomian tumbuh dan tingkat produksi meningkat. Peningkatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga pengangguran siklikal akan berkurang (Borjas, 2013: Hal 507).

## B. TEORI PENGANGGURAN

Beberapa hipotesis atau dugaan terkait konsep pengangguran telah dipaparkan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah George Borjas dalam bukunya *Labor Economics*. Beberapa hipotesis terkait teori pengangguran ini adalah “*The Intertemporal Substitution Hypothesis*” atau “Hipotesis Substitusi Antarwaktu”, dan “*The Sectoral Shifts Hypothesis*” atau “Hipotesis Pergeseran Sektor.” Selain itu, dalam materi ini juga akan dibahas terkait efisiensi upah dan pengangguran.

### 1. *The Intertemporal Substitution Hypothesis*

Hipotesis ini menjelaskan terkait masalah yang ada pada pengangguran friksional, model pencari kerja dapat memberikan penjelasan penting terkait pengangguran friksional. Pada materi penawaran tenaga kerja akan dijelaskan bahwa tenaga kerja akan mengalokasikan waktu yang banyak untuk menganggur atau rekreasi ketika tingkat upahnya rendah dan akan bekerja penuh ketika tingkat upah tinggi. Upah tinggi atau rendah dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, misalnya saja kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi maka tingkat upah riil akan naik, sebaliknya jika perekonomian mengalami penurunan atau kontraksi maka tingkat upah riil akan menurun.

Asumsi pada hipotesis ini ada dua, yaitu upah riil adalah *procyclical* dan penawaran tenaga kerja akan merespon untuk menggeser upah riil. Sifat *procyclical* merupakan sifat yang menunjukkan keterkaitan atau korelasi positif sesuai dengan prinsip ekonomi yang berlaku, dalam konteks ini maka

upah riil berkaitan erat dengan siklus bisnis. Meskipun sudah ada konsensus yang menyatakan upah adalah *procyclical* namun masih diragukan. (Borjas, 2013: Hal 525).

Perubahan upah riil selama siklus bisnis sulit dihitung karena dalam siklus bisnis terjadi perubahan komposisi angkatan kerja. Pada hipotesis substitusi antarwaktu dinyatakan pergeseran besar persediaan tenaga kerja dalam siklus bisnis dikarenakan oleh realokasi waktu oleh pekerja. Di mana persediaan tenaga kerja akan meningkat pada waktu upah rendah karena pekerja lebih memilih menganggur ketika upah rendah dan berlaku sebaliknya, yaitu persediaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah tinggi karena pekerja akan mengoptimalkan pekerjaannya pada upah tinggi.

## 2. *The Sectoral Shifts Hypothesis*

Hipotesis pergeseran sektor menyatakan bahwa pengangguran struktural akan meningkat karena keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa pengangguran struktural meningkat karena keterampilan tenaga kerja tidak mudah disesuaikan dengan sektor yang mengalami perubahan (Borjas, 2013: Hal 526).

Pergeseran permintaan tenaga kerja tidak terjadi pada seluruh sektor perekonomian. Pada kondisi tertentu satu sektor ekonomi akan tumbuh namun di sektor lainnya juga akan turun, sebagai contohnya adalah ketika kemajuan teknologi terjadi maka industri komputer akan berkembang, sedangkan industri mesin ketik akan semakin melemah. Perkembangan industri komputer otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja untuk memperbaiki komputer sementara tenaga kerja yang mampu memperbaiki mesin ketik akan banyak yang menganggur karena industri mesin ketik mengalami penurunan kapasitas produksi, pengangguran dari tenaga kerja yang mampu memperbaiki mesin ketik tidak secara langsung mendapatkan pekerjaan karena mereka harus menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan saat itu (perbaikan komputer).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan telah membuktikan bahwa ternyata di Amerika Serikat dan beberapa negara maju, hipotesis pergeseran sektoral yang berkontribusi menyebabkan pengangguran tidak berlaku. Pada hipotesis ini juga dikatakan bahwa tingkat pengangguran akan meningkat ketika ada banyak perpindahan pada saat pertumbuhan tenaga kerja ketika industri tumbuh dan merosot. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Abraham

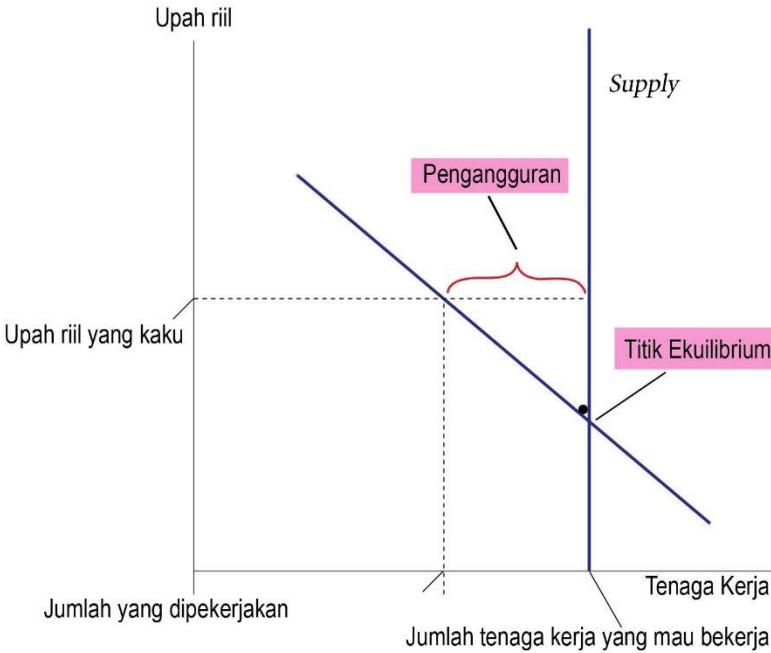
dan Katz (1986) yang menyatakan adanya korelasi positif antara perpindahan saat pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan tingkat pengangguran.

### 3. Efisiensi Upah dan Pengangguran

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika *output* dari industri itu mahal maka perusahaan akan mencoba untuk menerapkan upah efisien karena perusahaan membayar upah di atas upah pasar maka dengan diterapkannya upah efisien maka secara tidak langsung akan menghasilkan pengangguran sukarela.

Teori efisiensi upah menyatakan bahwa semakin tinggi upah maka semakin tinggi produktivitas. Peningkatan produktivitas mengindikasikan upah yang dibayarkan di atas upah ekuilibrium, ketika upah berada di atas upah ekuilibrium maka akan tercipta pengangguran (lihat Gambar 1.6).

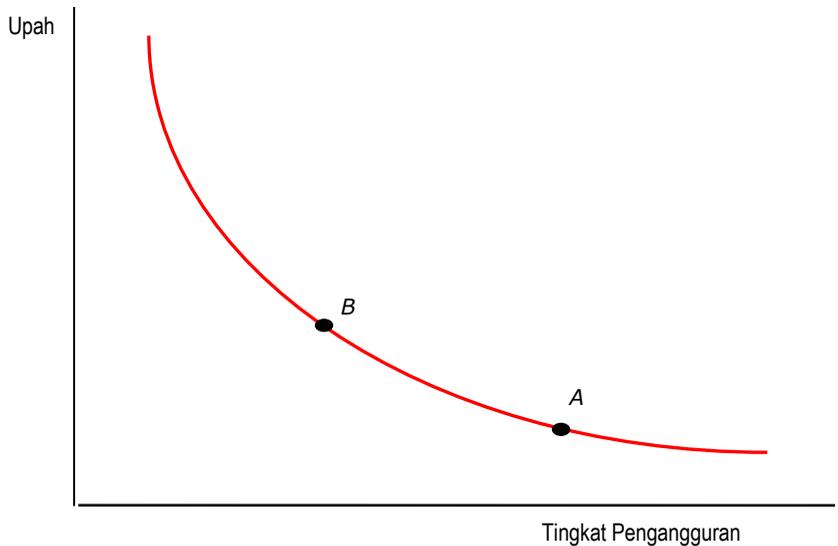
Upah minimum merupakan contoh kasus di mana upah yang dibayarkan perusahaan berada di atas upah ekuilibrium sehingga pada kondisi penerapan upah minimum maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan nantinya akan banyak tercipta pengangguran usia muda sehingga upah kaku kurang responsif terhadap perubahan permintaan dibandingkan upah kompetitif.



Sumber: Borjas, (2013: 528)

Gambar 1.6  
Pengangguran dan Upah Riil Kaku

Beberapa penelitian terbaru mengungkap bahwa efisiensi upah dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan pengangguran di banyak negara, lebih khususnya penelitian ini menampilkan kurva miring ke bawah yang menggambarkan hubungan negatif antara upah dan tingkat pengangguran. Ternyata pada setiap negara yang memiliki upah tinggi terletak pada negara yang memiliki tingkat pengangguran rendah dan upah cenderung rendah di mana tingkat pengangguran itu tinggi, keterkaitan upah dan pengangguran tersebut diilustrasikan oleh kurva upah (Gambar 1.7).



Pada suatu negara, misalnya negara B di mana tingkat upah yang tinggi juga memiliki kecenderungan tingkat pengangguran yang rendah.

Sumber: Borjas. (2013: 530)

Gambar 1.7  
Kurva Upah

### C. TINGKAT PENGANGGURAN *STEADY STATE*

Aliran masuk dan keluarnya pekerja pada pasar tenaga kerja menghasilkan beberapa pengangguran. Pada hakikatnya, tingkat pengangguran mapan (*steady state*) merupakan kondisi di mana jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sama dengan jumlah pengangguran yang mendapatkan pekerjaan sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut

$$/E = hU$$

/ : jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan

E : jumlah total pekerja yang bekerja

h : jumlah pengangguran yang mendapatkan pekerjaan

U : jumlah pengangguran

Angkatan kerja (AK) merupakan jumlah dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur sehingga dapat dituliskan  $AK = E + U$ , selanjutnya kita substitusikan pada persamaan pertama dan hasilnya adalah:

$$l(AK - U) = hU$$

Selanjutnya, kita akan menemukan persamaan baru yang menggambarkan tingkat pengangguran alamiah:

$$\begin{aligned} l(AK - U) &= hU \\ lAK - lU &= hU \\ lAK &= hU + lU \\ lAK &= (h+l)U \\ l / (h+l) &= U / AK \end{aligned}$$

Atau kita bisa menuliskan rumus tingkat pengangguran alamiahnya sebagai berikut:

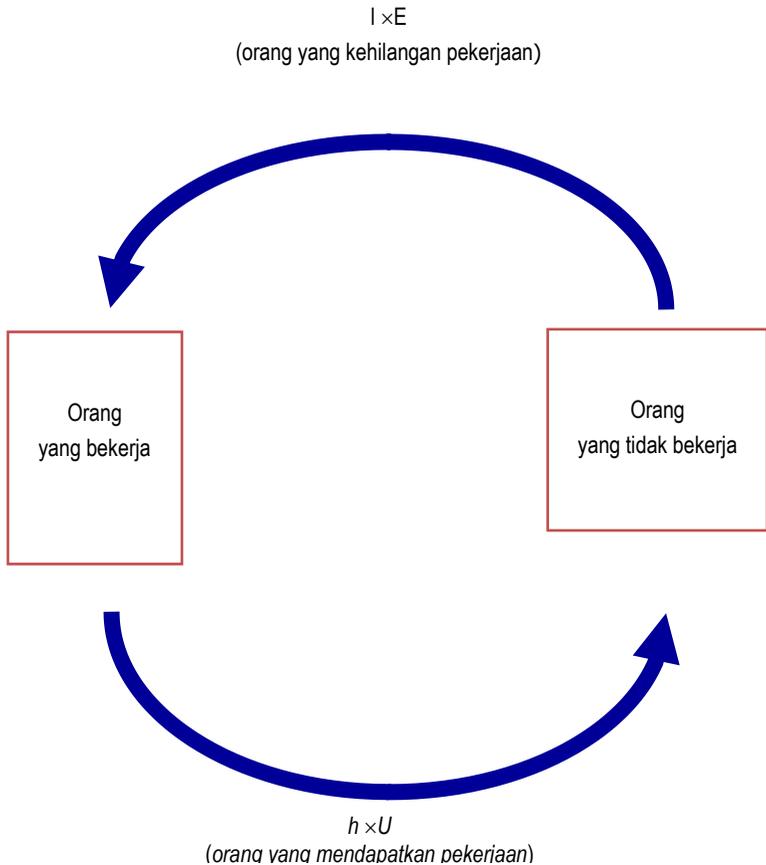
$$\frac{U}{AK} = \frac{l}{l + h}$$

Dari persamaan di atas, kita bisa mengetahui bahwa tingkat pengangguran *steady state* itu ditentukan oleh kemungkinan perpindahan pekerja dan orang yang menganggur. Secara garis besar, jika dikaitkan dengan pengangguran maka dua faktor utama yang menyebabkan tingkat pengangguran adalah pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan durasi pengangguran. Aliran tingkat pengangguran *steady state* dapat diilustrasikan pada Gambar 1.8.

Berikut ini adalah contoh penghitungan tingkat pengangguran alamiah, pada negara A setiap bulan 1% dari orang yang bekerja kehilangan pekerjaan ( $l=0.01$ ) setiap bulan, 10% dari orang yang tidak bekerja mendapatkan pekerjaan ( $h = 0.10$ ). Maka tingkat pengangguran alamiah sebagai berikut:

$$\frac{U}{AK} = \frac{0.01}{0.01 + 0.10} = 0.0909 \text{ atau } 9.09\%$$

Kebijakan pengentasan pengangguran alamiah akan berhasil ketika kebijakan tersebut mampu mengurangi  $l$  atau meningkatkan  $h$ , artinya pekerja yang kehilangan pekerjaannya akan berkurang atau pengangguran yang bekerja semakin meningkat.



Sumber: Borjas, (2013: 508)

**Gambar 1.8**  
Tingkat Pengangguran *Steady State*: Transisi Pekerja dan Penganggur

#### D. DURASI PENGANGGURAN

Durasi pengangguran merupakan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menganggur, misalnya ada 100 pengangguran di negara A dan ternyata 99 orang yang menganggur itu hanya butuh waktu 1 minggu untuk bekerja kembali, namun ada 1 orang yang menganggur membutuhkan waktu 101 minggu untuk bekerja kembali. Jadi, durasi pengangguran di negara tersebut adalah 200 minggu, diperoleh dari 99 minggu dari 99 orang dan 101 minggu dari 1 orang. Dari sana kita tahu bahwa durasi pengangguran itu bervariasi, secara keseluruhan durasi pengangguran cukup singkat, namun karena ada satu pengangguran yang memiliki durasi panjang maka durasi pengangguran menjadi panjang (Borjas, 2013: Hal 509).

Bukti menunjukkan bahwa pada tahun 1970 dan 1980 atau yang lebih tepatnya pada pertengahan tahun 1970 di Amerika Serikat terdapat 2.4% pengangguran yang mendapatkan pekerjaannya selama 6 bulan, 2.4% angkatan kerja tersebut memberikan kontribusi 42% terhadap durasi pengangguran di Amerika Serikat.

#### E. KONDISI PENGANGGURAN DI INDONESIA 2010-2015

Setidaknya terdapat delapan paradoks masalah pengangguran di Indonesia (Shafiq, 2004). *Pertama*, penduduk semakin banyak bermigrasi ke perkotaan padahal perkotaan mempunyai tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada daerah yang lain. *Kedua*, angka pengangguran untuk generasi muda (mereka yang baru lulus sekolah) lebih tinggi daripada usia 30 tahun ke atas. *Ketiga*, angka pengangguran untuk wanita lebih tinggi daripada pria. *Keempat*, tingkat pengangguran untuk angkatan kerja dengan kapasitas pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan SD atau SLTP. *Kelima*, angka pengangguran untuk mereka yang bersekolah di sekolah umum lebih besar daripada mereka yang bersekolah di sekolah kejuruan. *Keenam*, semenjak tahun 1970 Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang bagus, namun hal itu ternyata tidak disertai dengan penyerapan angkatan kerja. *Ketujuh*, tidak ada perbedaan angka pengangguran antarmasyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Terakhir, angka pengangguran untuk daerah Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, NTT, Maluku, dan Irian Jaya

lebih besar daripada provinsi tetangganya NTB, Kalimantan Tengah, dan Lampung tanpa ada penjelasan yang masuk akal.

Penyebab tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan tersebut disebabkan oleh banyaknya migrasi masuk ke perkotaan akibat timbul kesadaran bahwa di perkotaan pekerjaan lebih mudah didapatkan (Shafiq, 2004). Pendapat tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terkait tingkat pengangguran di desa dan kota selama tahun 2010 sampai 2014.

Berdasarkan Tabel 1.3 tingkat pengangguran terbuka di wilayah kota lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah desa, termasuk juga tingkat pengangguran terbuka usia mudanya. *Tren* pengangguran terbuka di wilayah kota naik 0.7% setiap tahunnya, namun untuk tingkat pengangguran terbuka usia muda memiliki kecenderungan untuk turun 0.34% setiap tahunnya.

Bagian ini mencoba untuk menyesuaikan teori kurva upah dengan kondisi di Indonesia. Kurva upah menyatakan bahwa upah berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran di mana upah yang tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Hal ini tidak berlaku dalam kondisi pengangguran 2010–2015, tingkat upah rendah kebanyakan berada di wilayah pedesaan namun tingkat pengangguran di desa justru lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran di kota.

Tabel 1.3  
Tingkat Pengangguran di Desa dan Kota Tahun 2010 -2015

TAHUN	INDIKATOR (%)				
	EPR	UR	YUR	LPR	CLR
<b>2010*</b>					
Desa	65.41	5.71	17.78	32.08	6.13
Kota	58.88	10.38	25.18	26.23	4.83
<b>2011</b>					
Desa	64.68	5.63	19.83	31.27	4.64
Kota	58.97	9.38	25.68	29.10	3.80
<b>2012</b>					
Desa	67.19	4.59	16.74	30.33	4.83
Kota	60.13	7.74	22.54	28.63	3.47

TAHUN	INDIKATOR (%)				
	EPR	UR	YUR	LPR	CLR
<b>2013</b>					
Desa	65.90	5.08	19.75	29.68	3.15
Kota	59.51	7.31	23.41	30.11	2.54
<b>2014</b>					
Desa	65.49	4.81	20.08	29.75	3.11
Kota	59.88	7.15	24.24	32.21	2.42
<b>2015*</b>					
Desa	66.10	4.53	20.04	28.96	2.37
Kota	60.15	6.11	23.11	32.72	1.79

Sumber: Ritonga, 2014

Keterangan :

\* : Angka Estimasi

EPR : Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja  
(*Employment to population ratio-EPR*)

UR : Tingkat Pengangguran Terbuka (*Unemployment Rate - UR*)

YUR : Tingkat Pengangguran Usia Muda (*Youth Unemployment Rate - YUR*)

LPR : Tingkat Pekerja Berupah Rendah (*Low Pay Rate-LPR*)

CLR : Tingkat Pekerja Anak (*Child Labour Rate-CLR*)

Tingkat pengangguran berdasarkan komposisi usia di Indonesia di dominasi diperoleh dari penghitungan jumlah penganggur usia 15-24 tahun dibagi dengan angkatan kerja usia 15-24 tahun setelah itu dikalikan 100% atau bisa ditulis dalam penghitungan matematis sebagai berikut:

$$YUR = \frac{\text{Pengangguran usia 15 - 24}}{\text{Angkatan Kerja usia 15 - 24}} \times 100\%$$

Tabel 1.4  
Tingkat Pengangguran Usia Muda Indonesia 2010-2015

Jenis kelamin / Daerah	2010*	2011	2012	2013	2014	2015*
Laki Laki	21.02	22.18	19.49	21.23	21.72	21.24
Perempuan	22.25	23.79	19.82	22.12	22.94	22.10
Desa	17.78	19.83	16.74	19.75	20.08	20.04
Kota	25.17	25.68	22.54	23.41	24.24	23.10
<b>Total</b>	21.50	22.81	19.62	21.58	22.20	21.58

Sumber: Ritonga, 2014

Jumlah pengangguran usia muda di Indonesia tidak seberapa besar karena jika dilihat dari Tabel 1.4 bahwa jumlah tingkat pengangguran usia muda dari tahun 2010-2015 berkisar dari angka 19-22%. Secara otomatis, tingkat pengangguran usia tua, yaitu di atas 24 tahun lebih besar, misalnya saja pada tahun 2015 di mana pengangguran usia muda mencapai 21.58% maka pengangguran usia tua mencapai 78.42% dan kebanyakan dari pengangguran usia muda itu adalah perempuan yang berada di kota.

Pada Tabel 1.5 yang menggambarkan kondisi pengangguran berdasarkan jenis kelamin sangat terlihat bahwa komposisi pengangguran di Indonesia baik pengangguran terbuka penuh atau pun setengah pengangguran didominasi oleh perempuan. Namun demikian, tingkat penurunan pengangguran setiap tahunnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, misalnya saja pada tingkat setengah pengangguran kaum perempuan turun 2.21% setiap tahunnya, laki-laki hanya turun 1.04% setiap tahunnya.

Banyaknya jumlah perempuan yang menganggur dapat diindikasikan dari rasio pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan hanya sedikit, laki-laki mendominasi sekitar 78% lebih pada tahun 2015.

Tabel 1.5  
Tingkat Pengangguran Laki - Laki dan Perempuan 2010 -2015

Tahun	INDIKATOR (%)		
	HUR	UR	ER
<b>2010</b>			
-Laki-Laki	12.8	6.1	78.6

Tahun	INDIKATOR (%)		
	HUR	UR	ER
-Perempuan	16.2	8.7	47.2
<b>2011</b>			
-Laki-Laki	11.0	6.6	78.3
-Perempuan	13.9	8.8	45.3
<b>2012</b>			
-Laki-Laki	10.5	5.7	79.4
-Perempuan	12.6	6.7	48.0
<b>2013</b>			
-Laki-Laki	10.4	6.0	78.3
-Perempuan	8.6	6.4	47.0
<b>2014</b>			
-Laki-Laki	7.9	5.7	78.2
-Perempuan	7.8	6.2	47.0
<b>2015*</b>			
-Laki-Laki	7.4	5.6	78.32
-Perempuan	5.19	5.14	47.29

Sumber: ILO, 2015

Keterangan :

\* : Angka Estimasi

HUR : Tingkat setengah Pengangguran (*Half Unemployment Rate - HUR*)

UR : Tingkat Pengangguran Terbuka (*Unemployment Rate - UR*)

ER : Rasio Pekerjaan Penduduk (*Employment Ratio - ER*)

Pembahasan selanjutnya, terkait tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Data tingkat pengangguran di Indonesia menyatakan bahwa tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) menyumbang kontribusi paling besar dalam tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tingkatan sekolah menengah yang sama, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selisihnya cukup jauh, meskipun

lulusan SMK lebih sedikit yang menganggur dibandingkan tingkat SMU, *tren* pengangguran tingkat SMK terus meningkat, sedangkan *tren* lulusan SMU mengalami penurunan. Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa setiap tahunnya tingkat pengangguran lulusan SMU turun 55.977 jiwa, sedangkan lulusan SMK akan meningkat 11.776 jiwa setiap tahunnya sehingga paradoks di atas akan tidak berlaku pada tahun selanjutnya.

Tabel 1.6 juga menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah potensi seseorang untuk menganggur. Data tersebut menunjukkan bahwa orang yang belum atau tidak sekolah berkontribusi paling sedikit untuk tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Memang ini bukan hasil akhir dan ada asumsi juga di era sekarang orang yang tidak sekolah juga semakin berkurang sehingga pengangguran yang berasal dari orang yang tidak sekolah juga berkurang. Terlepas dari itu masih belum ada bukti konkret yang menunjukkan pendidikan berkorelasi negatif dengan tingkat pengangguran, namun memang disadari atau tidak dengan pendidikan maka seseorang bisa terlepas dari jebakan pengangguran.

Tabel 1.6  
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan 2010-2015

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tidak/belum pernah sekolah	108,326	149,672	106,173	96,934	104,469	89,929
Tidak/belum tamat SD	573,693	648,636	556,897	506,276	500,062	487,368
SD	1,462,662	1,266,808	1,435,365	1,384,714	1,302,237	1,162,677
SLTP	1,659,451	1,986,748	1,725,723	1,755,536	1,630,021	1,512,153
SLTA Umum/SMU	2,130,190	2,381,096	1,955,726	1,900,230	1,928,148	2,021,220
SLTA Kejuruan/SMK	1,266,037	1,135,437	1,042,737	1,061,425	1,089,943	1,372,028
Akademi/Diploma	490,704	372,913	229,207	191,187	194,388	252,927
Universitas	765,074	589,329	499,521	429,614	446,721	609,494
<b>Total</b>	<b>8,456,135</b>	<b>8,530,637</b>	<b>7,551,349</b>	<b>7,325,914</b>	<b>7,195,987</b>	<b>7,507,795</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Berikut ini akan dijelaskan daerah manakah yang berkontribusi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Hal ini perlu diketahui agar bisa

digunakan sebagai upaya untuk menganalisis permasalahan pengangguran di setiap wilayah dan upaya menyusun kebijakan strategis yang tepat sasaran untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Tabel 1.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi 2010-2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Banten	13.91	13.68	10.31	9.65	9.47	9.06
Sulawesi Utara	10.05	9.92	8.27	7.14	7.40	8.86
Aceh	8.49	8.81	8.50	9.23	7.88	8.83
Jawa Barat	10.45	9.99	9.46	9.02	8.56	8.56
Maluku	9.55	9.50	7.65	8.44	8.55	8.32
DKI Jakarta	11.19	11.27	10.13	9.13	9.16	7.80
Kepulauan Riau	7.06	6.29	5.39	5.84	5.98	7.62
Kalimantan Timur	10.28	11.16	9.25	8.44	8.14	7.34
Riau	7.96	6.80	4.83	4.84	5.78	7.27
Sumatera Utara	7.72	7.82	6.35	6.27	6.09	6.55
Sumatera Barat	7.26	7.76	6.57	6.71	6.41	6.44
Papua Barat	7.72	6.77	5.99	4.38	4.36	6.34
Sulawesi Selatan	8.18	7.51	6.29	5.49	5.43	5.88
Maluku Utara	6.03	5.57	5.16	4.65	5.47	5.80
Sumatera Selatan	6.60	6.45	5.63	5.12	4.40	5.55
Nusa Tenggara Barat	5.53	5.35	5.23	5.29	5.52	5.34
Jawa Tengah	6.53	6.62	5.75	5.77	5.56	5.15
Kalimantan Barat	5.06	4.92	3.48	3.56	3.28	4.96
Kalimantan Selatan	5.57	6.01	4.77	3.77	3.91	4.88
Kepulauan Bangka Belitung	4.93	3.59	3.13	3.44	3.91	4.82
Sulawesi Tenggara	4.69	4.57	3.67	3.91	3.28	4.58
Jawa Timur	4.58	4.81	4.13	4.14	4.10	4.39
Lampung	5.76	5.95	5.20	5.38	4.94	4.29
DI Yogyakarta	5.85	4.97	3.94	3.50	2.75	4.07

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bengkulu	4.33	3.46	2.90	3.35	2.55	4.06
Gorontalo	5.11	5.85	4.70	4.33	3.31	3.86
Papua	3.81	4.43	3.37	3.03	3.46	3.85
Kalimantan Tengah	4.01	3.69	2.93	2.41	2.97	3.84
Sulawesi Tengah	4.75	5.54	3.85	3.43	3.30	3.55
Jambi	4.92	4.30	3.45	3.82	3.79	3.54
Nusa Tenggara Timur	3.41	2.94	2.79	2.68	2.61	3.48
Sulawesi Barat	3.68	3.06	2.13	2.18	1.84	2.58
Bali	3.32	2.98	2.16	1.88	1.64	1.68
<b>Indonesia</b>	<b>7.27</b>	<b>7.22</b>	<b>6.25</b>	<b>6.02</b>	<b>5.82</b>	<b>5.99</b>

*Sumber:* Badan Pusat Statistik, 2015 (diurutkan berdasarkan tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi ke yang paling rendah pada tahun 2015)

Data Badan Pusat statistik mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan provinsi menyatakan bahwa 10 besar daerah yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2015 adalah provinsi Banten, Sulawesi Utara, Aceh, Jawa Barat, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara. Hampir kebanyakan berada di luar jawa dari 10 wilayah tersebut hanya 3 yang berada di wilayah jawa lainnya berada di luar Jawa.

Pada materi pengangguran siklikal atau konjungtural telah dijelaskan bahwa untuk mengatasinya dibutuhkan peran pemerintah dalam mendorong permintaan agregat, permintaan agregat di sini bisa ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB (pertumbuhan ekonomi), dalam asumsinya pertumbuhan ekonomi maupun untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan keterkaitan antara laju PDP dan tingkat pengangguran adalah positif, di mana ketika laju PDB naik satu persen maka tingkat pengangguran akan naik 0.08%, angka tersebut dari penghitungan regresi berganda. Hasil tersebut menjadikan asumsi awal tidak berlaku.

Tabel 1.8  
Keterkaitan Laju PDB dan Tingkat Pengangguran 2010-2015

Tahun	Laju Pertumbuhan PDB Riil (% YOY)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2010	5.61	7.27
2011	6.17	7.22
2012	6.03	6.25
2013	5.56	6.02
2014	2.94	5.82
2015	7.83	5.99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Secara keseluruhan kondisi pengangguran di Indonesia menunjukkan tingkat pengangguran di kota lebih banyak daripada di desa dan ada kecenderungan untuk naik 0.7% setiap tahunnya. Pengangguran usia muda lebih sedikit dari pada usia tua, yaitu sebesar 21.58% dibandingkan 78.42%. Perempuan mendominasi jenis kelamin yang berkontribusi pada tingkat pengangguran, namun ada indikasi penurunan 2.21% setiap tahunnya. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikannya lebih didominasi oleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), namun *tren* penurunan SMU lebih besar jika dibandingkan tingkat pendidikan yang sama (SMK), yaitu sebesar 55.977 jiwa. Wilayah yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh wilayah luar Jawa di mana dari 10 besar provinsi yang memiliki tingkat pengangguran paling besar pada tahun 2015, tiga di antaranya berada di pulau Jawa dan sisanya berada di luar Jawa.

Asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran pun tidak berlaku di tahun 2010-2015 karena dari hasil regresi berganda menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka tingkat pengangguran akan naik 0.08% setiap tahunnya. Jadi, secara keseluruhan kondisi pengangguran di Indonesia dapat dikatakan tidak terlalu buruk, namun juga tidak bisa dikatakan sangat baik.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pengangguran struktural disebabkan oleh adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Mengapa hal tersebut terjadi? Jelaskan!
- 2) Beberapa hipotesis atau dugaan terkait konsep pengangguran telah dipaparkan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah George Borjas dalam bukunya *Labor Economics*. Sebutkan dan jelaskan hipotesis apa saja dalam teori pengangguran!
- 3) Tingkat pengangguran *steady state* bersifat konstan pada kondisi perekonomian yang stabil. Jelaskan makna tingkat pengangguran *steady state*! Apa saja faktor yang menentukan?
- 4) Perkembangan pengangguran di Indonesia pada tahun-tahun terakhir menarik untuk dikaji. Bagaimana kondisi pengangguran di Indonesia pada tahun 2010-2015? Jelaskan!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktural dalam struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran struktural yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan dengan keterampilan tersebut. Misalnya, terjadi pergeseran dari perekonomian yang agraris menuju perekonomian yang industrial. Di satu pihak, terjadi suatu pengurangan tenaga di sektor pertanian dan di pihak lain bertambahnya tenaga kerja di sektor industri. Akan tetapi, tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian tadi tidak begitu saja dapat terserap di sektor industri karena sektor industri memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan tertentu. Akibatnya, tenaga yang berlebih dari sektor pertanian tadi merupakan penganggur struktural.
- 2) Beberapa hipotesis terkait teori pengangguran ini adalah *The Intertemporal Substitution Hypothesis* atau Hipotesis Substitusi Antarwaktu dan *The Sectoral Shifts Hypothesis* atau Hipotesis Pergeseran Sektor. Pada Hipotesis Substitusi Antarwaktu (dinyatakan

pergeseran besar persediaan tenaga kerja dalam siklus bisnis dikarenakan oleh realokasi waktu oleh pekerja. Di mana persediaan tenaga kerja akan meningkat pada waktu upah rendah karena pekerja lebih memilih menganggur ketika upah rendah dan berlaku sebaliknya, yaitu persediaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah tinggi karena pekerja akan mengoptimalkan pekerjaannya pada upah tinggi. Hipotesis Pergeseran Sektor menyatakan bahwa pengangguran struktural akan meningkat karena keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hipotesis ini juga menyatakan bahwa pengangguran struktural meningkat karena keterampilan tenaga kerja tidak mudah disesuaikan dengan sektor yang mengalami perubahan.

- 3) Pada hakikatnya, tingkat pengangguran mapan (*steady state*) merupakan kondisi di mana jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sama dengan jumlah pengangguran yang mendapatkan pekerjaan tingkat pengangguran *steady state* itu ditentukan oleh kemungkinan perpindahan pekerja dan orang yang menganggur. Secara garis besar, jika dikaitkan dengan pengangguran maka dua faktor utama yang menyebabkan tingkat pengangguran adalah pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan durasi pengangguran.
- 4) Secara keseluruhan kondisi pengangguran di Indonesia adalah tingkat pengangguran di kota lebih banyak daripada di desa dan ada kecenderungan untuk naik 0.7% setiap tahunnya. Pengangguran usia muda lebih sedikit daripada usia tua, yaitu sebesar 21.58% dibandingkan 78.42%. Perempuan mendominasi jenis kelamin yang berkontribusi pada tingkat pengangguran, namun ada indikasi penurunan 2.21% setiap tahunnya. Pengangguran berdasarkan tingkat pendidikannya lebih didominasi oleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), namun *tren* penurunan SMU lebih besar jika dibandingkan tingkat pendidikan yang sama (SMK), yaitu sebesar 55.977 jiwa. Wilayah yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh wilayah luar Jawa di mana dari 10 besar provinsi yang memiliki tingkat pengangguran paling besar pada tahun 2015, tiga di antaranya berada di pulau Jawa dan sisanya berada di luar Jawa.



## RANGKUMAN

---

1. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (namun sensus penduduk tahun 1971 tidak memberikan batasan mengenai jumlah jam kerja per hari atau per minggu). Menurut penyebabnya dibedakan menjadi pengangguran friksional (pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada). Pengangguran musiman (pengangguran terjadi karena pergantian musim), pengangguran struktural (pengangguran terjadi karena adanya perubahan struktural dalam struktur atau komposisi perekonomian), pengangguran siklikal atau konjungtural (pengangguran terjadi karena adanya siklus ekonomi yang melamban).
2. Hipotesis terkait teori pengangguran ini adalah *The Intertemporal Substitution Hypothesis* atau Hipotesis Substitusi Antarwaktu dan *The Sectoral Shifts Hypothesis* atau Hipotesis Pergeseran Sektor. Hipotesis Substitusi Antarwaktu menyatakan pergeseran besar persediaan tenaga kerja dalam siklus bisnis dikarenakan oleh realokasi waktu oleh pekerja maksudnya persediaan tenaga kerja akan meningkat pada waktu upah rendah dan akan berkurang ketika upah tinggi. Hipotesis Pergeseran Sektor menyatakan bahwa pengangguran struktural akan meningkat karena keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tidak sesuai dengan keterampilan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.
3. Tingkat pengangguran mapan (*steady state*) merupakan kondisi di mana jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan sama dengan jumlah pengangguran yang mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran *steady state* itu ditentukan oleh kemungkinan perpindahan pekerja dan orang yang menganggur.
4. Durasi pengangguran merupakan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menganggur.
5. Secara keseluruhan kondisi pengangguran di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2015 tidak terlalu buruk dan tidak sangat baik karena tingkat pengangguran di kota ada kecenderungan untuk naik 0.7% setiap tahunnya. Pengangguran usia muda sebesar 21.58%. Perempuan mendominasi jenis kelamin yang berkontribusi pada tingkat pengangguran, namun ada indikasi penurunan 2.21%. Pendidikan tingkat SMU lebih besar, namun *tren* penurunan SMU lebih besar jika dibandingkan tingkat SMK, yaitu sebesar 55.977 jiwa. Wilayah yang berkontribusi terhadap tingkat pengangguran

terbuka di Indonesia, tiga di antaranya berada di pulau Jawa dan sisanya berada di luar Jawa.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *International Labor Organization* atau ILO dalam mendefinisikan pengangguran terbuka, *kecuali* ....
  - A. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
  - B. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
  - C. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
  - D. mereka yang sudah punya pekerjaan dan mulai bekerja
  
- 2) Salah satu penyebab terjadinya pengangguran friksional adalah ....
  - A. jam kerja yang berlebih
  - B. kemampuan yang kurang
  - C. kurangnya informasi
  - D. karena diskriminasi upah
  
- 3) Tenaga kerja yang bekerja hanya pada saat liburan sekolah sebagai pemandu wisata tergolong ke dalam pengangguran ....
  - A. struktural
  - B. musiman
  - C. penuh
  - D. berkala
  
- 4) Secara matematis, tingkat pengangguran *steady state* adalah ....
  - A.  $IE < hU$
  - B.  $IE = hU$
  - C.  $IE > hU$
  - D.  $IE \sim hU$
  
- 5) Tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan di Indonesia disebabkan oleh ....
  - A. konsentrasi perekonomian
  - B. kesejahteraan yang baik
  - C. biaya hidup yang tinggi
  - D. besarnya migrasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) D
- 3) D
- 4) A
- 5) D

### *Tes Formatif 2*

- 1) D
- 2) C
- 3) B
- 4) B
- 5) D

## Daftar Pustaka

- Abraham, Katherine G. dan Lawrence F. Katz. 1986. "Cyclical Unemployment: Sectoral Shifts or Aggregate Disturbances?". *Journal of Political Economy*, Vol. 94, No. 3, pp. 507-522.
- Borjas, George J., 2013. *Labor Economics 6<sup>th</sup> Edition*. McGraw Hill.
- Badan Pusat Statistik. 2016. [*Seri 2010*] *Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen), 2011-2013*. (Online)  
(<http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1139>, diakses 26 Mei 2016)
- Carrington, William J., "The Alaskan Labor Market During Pipeline Era", *Journal Of Political Economy*, February 1996.
- Husmanns, Ralf. dkk. 1992. *Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods*. Genewa: International Labour Office.
- ILO. 2015. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015: Memperkuat Daya Saing dan Produktivitas Melalui Pekerjaan Layak/Kantor Perburuhan Internasional–Jakarta*: ILO. (Online).  
([http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_381565.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_381565.pdf), diakses 28 Mei 2016).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. *Neraca Perdagangan Indonesia Total 2011–2016*. (Online).  
(<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>, diakses 26 Mei 2016).
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2016. UU Nomor 13 Tahun 2003. (Online).  
([http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_perundangan&id=315&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2003](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=315&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2003), diakses 26 Mei 2016).
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Macroeconomics 6th*. Worth Publisher.
- Ritonga, Razali. 2014. *Kebutuhan Data Ketenagakerjaan untuk Pembangunan Berkelanjutan Badan Pusat Statistik*. (Online)  
(<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo->

jakarta/documents/presentation/wcms\_346599.pdf, diakses 28 Mei 2016).

Simanjuntak Payaman, 1998, “*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*”, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Todaro, M.P and Smith, S.C, 2012. *Economic Development, 11th Edition*. Addison Wesley, Boston.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Produk Domestik Bruto Per Kapita, Produk Nasional Bruto Per Kapita dan Pendapatan Nasional Per Kapita, 2000-2013(Rupiah)*.(Online)  
([http://www.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo\\_11\\_76.xls](http://www.bps.go.id/website/tabelExcelIndo/indo_11_76.xls), diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2013-2015. (Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. [Seri 2010] PDB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) 2010-2013. (Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1128> diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. [Seri 2010] PDB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) 2014 – 2016. (Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/833>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 1996 - 2013 (y-on-y) 2014 - 2016. (Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/909> diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2007-2009 (Maret), 2010-2011, 2012 (Maret dan September)*.

(Online) (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. *Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y) 2014 - 2016*.

(Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/836>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. Tingkat Inflasi.

(Online). (<http://www.bps.go.id/linktabelstatis/view/id/907>, diakses 5 Maret 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2015.

(Online). (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. *Upah Minimum Regional Propinsi (Rupiah) 2005 - 2014*.

(Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2016. [Seri 2010] *Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen), 2011 - 2013*. (Online). (<http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1139>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986-2015.

(Online). (<http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2015. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 1986-2015*.

(Online). (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981>, diakses 26 Mei 2016).

\_\_\_\_\_. 2016. *Laju Pertumbuhan Triwulanan terhadap Triwulan yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y) 2014 - 2016*.

(Online). (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/836>, diakses 26 Mei 2016).